

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM OLEH SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA TINDAK
PIDANA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI KABUPATEN BULELENG**

Oleh

Gede Ian Narayana Yadnya. NIM 2114101094

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada telah diatur dalam UU. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan UU. Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada namun dalam prosesnya masih terjadi pelanggaran berupa tindak pidana Pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum pada tindak pidana Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Buleleng yang dilaksanakan oleh Sentra GAKKUMDU dan untuk mengetahui faktor yang menghambat proses penegakan hukum tindak pidana Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan oleh Sentra GAKKUMDU. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Teknik penentuan sampel menggunakan Teknik *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui penerapan teknik wawancara dan pendekatan analisis literatur. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang diperoleh. Sentra GAKKUMDU memiliki peran penting dalam menegakkan hukum pemilu melalui pendekatan terpadu, yang menggabungkan fungsi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sembari menjalankan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Sentra GAKKUMDU memiliki fungsi penting dalam penegakan standar hukum terkait pelanggaran pemilu di Kabupaten Buleleng. Kendala yang menghambat penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana pemilu di Kabupaten Buleleng antara lain adalah waktu penanganan yang terbatas, kurangnya saksi untuk klarifikasi, tidak adanya sekretariat Sentra GAKKUMDU, tidak memadainya regulasi politik uang yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, budaya kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, dan perbedaan pendapat yang berulang di dalam Sentra GAKKUMDU.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemilu dan Pilkada, Sentra GAKKUMDU

**IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT BY THE INTEGRATED
LAW ENFORCEMENT CENTER (GAKKUMDU) IN GENERAL
ELECTION AND REGIONAL HEAD ELECTIONS CRIMES IN
BULELENG REGENCY**

By

Gede Ian Narayana Yadnya. NIM 2114101094

Law Department

ABSTRACT

The implementation of the General Election and Regional Election has been regulated in Law. Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law. Number 10 of 2016 concerning Regional Elections, but in the process there are still violations in the form of criminal acts of the General Election. The purpose of this study is to determine the process of law enforcement on criminal acts of the General Election and Regional Election in Buleleng Regency which is carried out by the GAKKUMDU Center and to determine the factors that hinder the process of law enforcement on criminal acts of the General Election and Regional Election carried out by the GAKKUMDU Center. This study is an empirical legal study, descriptive in nature. The sampling technique uses non-probability sampling techniques with a purposive sampling form. Data collection is carried out using interview techniques and literature study techniques. The collected data are analyzed qualitatively. The role of the GAKKUMDU Center in enforcing criminal election law in Buleleng Regency is to play a role in enforcing election law in one door, which consists of elements of Bawaslu, Police and Prosecutor's Office, and exercising authority in accordance with Bawaslu Regulation Number 2 of 2023. Obstacles to enforcing criminal election law in Buleleng Regency are as follows: short handling time limit, witnesses are not present in the clarification, there is no GAKKUMDU Center secretariat yet, weak money politics regulations in Law Number 7 of 2017, legal culture regarding public legal awareness is still weak, there are still frequent differences of opinion within the GAKKUMDU Center.

Keywords: Criminal Acts, General Elections and Regional Head Elections, GAKKUMDU Center